# BAB IPENDAHULUAN

##

## Latar Belakang Penelitian

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang besar dan berkualitas merupakan investasi yang berharga bagi suatu negara dengan produktifitasnya yang tinggi. Namun sebaliknya penduduk yang besar namun tidak berkualitas hanya akan menjadi beban negara, karena produktifitas ditentukan oleh pendidikan, status kesehatan/gizi dan penghasilan. Pendidikan rendah tanpa keterampilan tertentu menghasilkan pendapatan yang rendah, pendapatan rendah mengurangi akses untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan status kesehatan sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan produktifitas rendah. Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi, proporsi penduduk muda tinggi dan meningkatnya permintaan pemenuhan hak-hak dasar maupun kebutuhan.

**Badan** Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat jumlah penduduk terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat. Totalnya sebanyak 45,5 juta atau 20 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat (http://lifestyle.okezone.com, 23 April 2014 - 23:58 WIB). Program KB merupakan salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Apabila program Keluarga Berencana (KB) tidak ditangani dengan serius maka laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat akan jauh lebih besar lagi.

Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara atau provinsi mempunyai dampak terhadap pembangunan tersebut antara lain dalam hal kesejahteraan penduduknya. Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) adalah salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian jumlah penduduk di indonesia. Dalam hal ini BKKBN tidak hanya bertanggung jawab untuk menurunkan angka kelahiran, tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah keluarga.

Meningkatkan keluarga yang sejahtera sebagai unit terkecil dalam pembangunan banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan potensi keluarga. Pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan potensi keluarga dalam hal kesejahteraan. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi berarti memberikan kesempatan kepada keluarga untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Tanpa kondisi ekonomi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan usaha ini telah dirintis dan dipelopori oleh BKKBN yang merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha.

 Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang dimotori oleh BKKBN. Kegiatan–kegiatan tersebut antara lain (1) memberikan bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir, dana BUMN, Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan Kukesra Mandiri; (2) pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut, pembinaan kemitraan baik dalam hal permodalan, SDM, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran; (3) pembinaan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok ini dengan berbagai pihak; (4) pembinaan produksi agar kelompok UPPKS menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas, yang sesuai dengan permintaan pasar.

Selama ini banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan program UPPKS di lapangan, terutama beberapa tahun terakhir ini, hal ini tentunya beralasan kuat, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini kita semakin jarang menemukan kelompok UPPKS yang baru berdiri maupun kelompok UPPKS yang aktif melakukan kegiatan usaha di lapangan. Hal ini mengusik dan menjadi sebuah tanda tanya, “Apakah program UPPKS memiliki kontribusi yang signifikan pada meningkatnya jumlah persentase kesertaan ber-KB, khususnya pada PUS KPS dan KS 1”. Kondisi dilapangan mengungkapkan bahwa keberadaan UPPKS melemah sehingga kesertaan anggota ber-KB berkurang. Beberapa hal yang menyebabkan melemahnya program UPPKS adalah rendahnya komitmen pemerintah daerah dan pengelola program di kabupaten/kota,kecamatan, kelurahan/ desa tentang pentingnya peningkatan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan UPPKS dan kesertaan ber KB. Semakin melemahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana bagi anggota kelompok UPPKS untuk ber-KB juga mengakibatkan menurunnya kesertaan ber-KB dalam kelompok UPPKS, sehingga diperlukan komitmen baru pemerintah daerah dan pengelola program KB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program UPPKS. Dan yang tidak kalah penting adalah, diperlukannya tenaga yang mampu mengelola dan membina kelompok UPPKS, agar keikutsertaan anggota kelompok UPPKS dalam ber-KB dapat meningkat. (www.bkkbn.go.id/litbang/pusna/Data/policybrief2[2].pdf)

Pemenuhan kebutuhan keluarga bukan saja tanggung jawab pemerintah namun keikutsertaan dalam mewujudkan kesejahteraan yang baik sangat diperlukan ikut serta masyarakat berupa individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan salah satu diantaranya dengan adanya pembinaan keluarga sejahtera dari masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan anggota kelompok UPPKS sebagai penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam kelompok masyarakat guna menumbuhkan, mengarahkan, membina keluarga yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga dalam kehidupan seharinya.

Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga lebih diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera. Kelompok UPPKS memegang peranan yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi modal dasar yang tangguh bagi kesinambungan pembangunan nasional.

Berdasarkan data dari Kecamatan Banjaran, bahwa program ini telah dilaksanakan di kecamatan tersebut. Adapun anggotanya ada yang ber KB maupun tidak ber KB. Kelompok yang mengikuti sebanyak 21 dan terbagi beberapa desa di Kecamatan Banjaran dengan populasi 162 anggota.

Permasalahan yang timbul bagaimana anggota UPPKS yang ber KB dengan anggota UPPKS yang tidak ber KB dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya? Apakah anggota UPPKS yang ber KB dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau anggota UPPKS yang tidak ber KB yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.Berdasarkan hasil penelitian dimana anggota UPPKS yang tidak ber KB mempunyai anak lebih dari 2 adapun anggota UPPKS yang ber KB mempunyai anak rata-rata 2 setiap anggotanya.

Topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Studi tentang pola-pola interaksi antara komponen yang berbeda dalam badan-badan sosial, dan tentang pengaruhnya pada klien dan staf lembaga” (Soehartono,2008:16). Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada “Studi Komparatif Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Antara Peserta Kelompok UPPKS Yang Ber KB Dengan Peserta Kelompok UPPKS Yang Tidak Ber KB Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”.

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas maka berikut ini peneliti mengidentifikasikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar keluarga peserta kelompok UPPKS yang ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar keluarga peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar keluarga antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar keluarga peserta kelompok UPPKS yang ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar keluarga peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep ilmu kesejahteraan sosial sehingga dapat diterapkan pada masa yang akan datang.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan yang dapat digunakan, baik oleh pemerintahan kota dan desa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama berkaitan dengan program pemberdayaan pada masyarakat.

**1.4 Kerangka Pemikiran**

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan di bidang sosial yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Kesejahteraan sosial sebagai pemberian pelayanan guna memberikan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara individu maupun kelompok, dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Definisi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga – lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan konstribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat( Suharto, 2010:1)

Berdasarkan definisi di atas maka kesejahteraan sosial menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan dan bagaimana seorang individu dapat menjalankan perannya dengan baik. Kesejahteraan sosial selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dan masalah – masalah sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya memberikan bantuan untuk masyarakat yang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan peranannya dalam melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan–kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sedangkan definisi kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2003:153), yaitu : “Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang – orang yang bermasalah”.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa pekerjaan sosial memberikan pelayanan-pelayanan baik itu motivasi, pemberdayaan, pengembangan dan serta perbaikan masyarakat untuk berusaha membantu meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat.

Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ditunjang juga oleh seperangkat program yang terarah dan berkelanjutan guna mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik, hal tersebut dapat dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial. Definisi Usaha Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu : “Usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka yang dikatakan usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu pemberian pelayanan sosial yang diberikan pihak pemerintah maupun oleh masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus yang tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi sosial setiap individu di dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial di masyarakat guna mencapai keberfungsian sosial individu, kelompok, maupun masyarakat yang lebih baik di dalam kehidupannya. Pelayanan sosial menurut Kahn (1979) yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 51-52), yaitu :

*Social services may be interpreted in an institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic level of health-education-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate access to services and institutions generally, and to assist those in difficulty and need*.

Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan yang terdiri dari program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berdasarkan pernyataan di atas pelayanan sosial terdiri dari program untuk menjamin tingkatan dasar hidup dalam meningkatkan keberfungsian individu, kelompok, maupun masyarakat, yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan sosial yang telah teroganisir dan disusun.

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh setiap manusia, karena dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memberikan kesejahteraan pada dirinya, tetapi sebaliknya jika kebutuhan tidak dapat terpenuhi oleh manusia akan mengakibatkan timbulnya masalah. Kebutuhan dasar menurut Susetiawan(1994 : 45-46) yang dikutip oleh Huraerah (2011: 16), yaitu :

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti pangan, sandang, papan yang dapat dijangkau setiap orang. Kedua, pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, airbersih yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. Ketiga, ada hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi.

Berdasarkan kebutuhan di atas bahwa, anggota keluarga pada dasarnya sangat membutuhkan ketiga konsep di atas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dikarenakan tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain, dan semuanya dianggap penting. Pekerja sosial dapat membantu mengurasi permasalahan tentang kebutuhan dasar yang dihubungkan ke sumber-sumber pelayanan sosial.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai program beyond family planning yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,khususnya peserta KB keluarga pra sejahtera dan KS 1 (BKKBN : 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa UPPKS ini membantu mensejahterakan keluarga baik dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1 dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaannya dilaksanakan dengan membentuk kelompok yang diberikan modal usaha untuk dimanfaatkan dengan baik.

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah wadah pemberdayaan keluarga di bidang usaha dan tenaga terampil yang angotanya terdiri dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 serta keluarga sejahtera 2 ke atas, diutamakan ibu-ibu yang berstatus pasangan usia subur (PUS), baik sedang, atau maupun pasca KB ( Badan Pengurus Daerah Paguyuban Kelompok UPPKS : 2003)

Pemaparan diatas dijelaskan bahwa, anggota tersebut diutamakan ibu-ibu yang ber KB pasangan usia subur maupun pasca KB. Ini ada di Kecamatan Banjaran baik itu peserta yang ber KB maupun peserta yang tidak ber KB dalam mengikuti program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

* 1. **Hipotesis**

 Kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis utama sebagai berikut : ada perbedaan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar keluarga antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”. Adapun sub-sub hipotesisnya sebagai berikut :

1. Ada perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dalam hal konsumsi bahan-bahan pokok antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
2. Ada perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dalam hal pelayanan pokok antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
3. Ada perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dalam hal hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program antara peserta kelompok UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
	1. **Definisi Operasional**

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk dapat mempertahankan hidup seperti pangan, sandang, papan, sosial, psikologis serta akses untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan pribadi.
2. (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga yang anggotanya keluarga pra sejatera dan kelaurga sejahtera 1
3. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama.
4. Peserta UPPKS yang ber KB adalah peserta atau anggota yang di dalamnya mengikuti program KB
5. Peserta UPPKS yang tidak ber KB adalah peserta atau anggota yang di dalamnya pasangan usia subur, dan tidak ikut KB lagi

**Tabel 1.1**

**Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Dimensi | Indikator | Item Pernyataan |
| Variabel x :Pemenuhan Kebutuhan dasar | Konsumsi bahan-bahan pokokPelayanan pokokHak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program | SandangPangan PapanPendidikanKesehatanAir bersihPartisipasi di masyarakatPengembangan pribadi | 1. Memperhatikan kebersihan pakaian
2. Membeli pakaian dalam satu tahun
3. Frekuensi mengkonsumsi nasi telur dalam sebulan
4. Frekuesnsi Mengkonsumsi daging dalam sebulan
5. Mengkonsumsi buah- buahan dalam sehari
6. Mengkonsumsi susu tiap hari
7. Jenis rumah yang di tempati
8. Kamar mandi yang digunakan di rumah
9. MCK yang digunakan di rumah
10. Status rumah
11. Kebersihan perkarangan rumah
12. Kebersihan dapur rumah
13. Kemampuan bayar sekolah anak
14. Kemampuan membeli pakaian sekolah anak
15. Kemampuan membeli pakaian sekolah anak dalam satu tahun
16. Memberikan motivasi belajar kepada anak
17. Kemampuan membiayai pengobatan di rumah sakit
18. Kebutuhan air untuk minum
19. Kebutuhan air untuk memasak
20. Kebutuhan air untuk mandi
21. Mengikuti penyuluhan KB
22. Memberikan sumbangan sukarela untuk kegiatan posyandu
23. Memberikan masukan setelah pelayanan posyandu
24. Mengikuti kegiatan pembinaan UPPKS
25. Mengikuti kegiatan permodalan UPPKS
26. Memberikan pendapat setelah melaksanakan pembinaan UPPKS
27. Memberikan pendapat setelah melaksanakan permodalan UPPKS
28. Ikut dalam pertemuan anggota kelompok UPPKS
29. Ikut dalam member masukan kepada kelompok UPPKS
30. Pengetahuan tata cara meminjam modal
31. Pengetahuan tata cara pengembalian modal
 |

* 1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Deskriptif komparatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang perbedaan dari dua kelompok yang setara. Dalam penelitian ini akan dicari perbedaan tentang pemenuhan kebutuhan dasar keluarga antara peserta UPPKS yang ber KB dengan peserta UPPKS yang tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

* + 1. **Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah peserta UPPKS yang ber KB dengan peserta kelompok UPPKS yang tidak ber KB . jumlah peserta kelompok UPPKS yang ber KB untuk pra sejahtera dan KS 1 sebanyak 54 orang dari jumlah tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 40% yaitu 21,6 atau dibulatkan menjadi 22 orang peserta UPPKS yang ber KB sebagai kelompok 1, peneliti mengambil sampel 22 orang peserta UPPKS yang tidak ber KB sebagai kelompok 2 disesuaikan dengan kelompok 1. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling.* *Random Sampling* menurut Soehartono (2008: 60), yaitu : “Cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga dapat dilakukan dengan cara undian”. Alasan peneliti menggunakan *simple random sampling* karena responden yang diambil bersifat homogen atau mempunyai latar belakang yang sama.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung di lapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.
2. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diisi sendiri oleh responden sebagai data primer.
	* 1. **Alat Ukur Penelitian**

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan Skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian Skala Ordinal menurut Soehartono (2008: 76), yaitu :

Skala Ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya daripada golongan yang lain.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah model Likert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur. Skala Likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut :

1. Kategori jawaban sangat baik diberi nilai 5
2. Kategori jawaban baik diberi nilai 4
3. Kategori jawaban kurang baik diberi nilai 3
4. Kategori jawaban tidak baik diberi nilai 2
5. Kategori jawaban sangat tidak baik diberi nilai 1
	* 1. **Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu suatu teknik analisis data dalam bentuk angka-angka dalam tabel. Analisis data yang digunakan adalah analisis data non parametik dengan model analisis data U-Mann Whitney, dan asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan model analisis ini adalah:

a. Kedudukan antara independen yaitu populasi yang diperbandingkan dapat saling bergantung.

b. Skala yang digunakan dalam variable ini skala ordinal sedangkan teknik perhitungan sampel ditentukan sebagai berikut:

$$U\_{1}=n\_{1}.n\_{2}+\frac{n\_{1}(n\_{1}+1)}{2}-\sum\_{}^{}R\_{1}$$

$$U\_{2}=n\_{1}.n\_{2}+\frac{n\_{2}(n\_{2}+1)}{2}-\sum\_{}^{}R\_{2}$$

Keterangan :

U = symbol statistic yang dipakai dalam tes U-Mann Whitney

N1 = jumlah responden kelompok 1

N2 = jumlah responden kelompok II

R1 = jumlah rank kelompok I

R2 = jumlah rank kelompok II

Pengujian statistik ini berdasarkan pada karakteristik kelompok, yaitu kedua kelompok saling lepas kemudian hasil perhitungan dari rumus U di masukkan ke dalam rumus Z hitung dengan rumus:

Uskor - $\frac{n\_{1}×n\_{2}}{2}$

Dimana : Zhitung = $\sqrt{\left\{\left[\frac{n\_{1}×n\_{2}}{N(N-1)}\right]\left[\frac{N^{3}-N}{12}-\sum\_{}^{}T\right]\right\}}$

N = $n\_{1}+n\_{2}$

T = $\frac{T^{3}- T}{12}$

T : banyaknya observasi yang berangka sama untuk suatu ranking tertentu.

Kriteria pengujian hipotesis:

Pada taraf signifikan 5% jika Z hitung lebih besar dari Z table maka H1 diterima dan H0 ditolak.

Prosedurnya adalah :

1. Tentukan harga-harga n1 dan n2 dari dua kelompok, dengan table sampel N = n1 + n2
2. Berikan ranking-ranking bersama-sama skor pada dua kelompok itu, ranking satu diberi skor yang secara aljabar paling rendah. Ranking tersusun mulai dari satu tinggal N1 untuk observasi yang berangka sama, berikan rata-rata ranking yang berangka sama.
3. Tentukan harga U, baik dengan cara menghitung maupun dengan menerapkan rumus.
	1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai berikut :

1. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian Kesejahteraan Sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.
2. Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung merupakan tempat keberlangsungan program UPPKS yang memiliki potensi dalam pengembangan profesi pekerjaan sosial. Dengan adanya program ini maka akan menambah pengetahuan dan pengalaman tentang apa yang disebut dengan pekerjaan sosial.
	* 1. **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama enam bulan terhitung sejak bulan Maret sampai Oktober 2014, dengan selang waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan